

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi di Indonesia dilandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasar pada asas kekeluargaan. Berdasarkan UU ini, pengertian koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, yang dikutip oleh Wulantika (2010), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan perekonomian yang didasarkan oleh semangat tolong menolong. Semangat tolong menolong yang dimaksud adalah seorang untuk semua dan semua

untuk seorang. Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* yang dikutip oleh Hendar (2010, p.18), koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum yang memiliki tujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan cara saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta harus didasarkan pada prinsip koperasi.

2.1.2 Prinsip dan Jenis Koperasi

Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh koperasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen;
5. koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
7. koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Penyelenggaraan kegiatan usaha pelayanan oleh koperasi di Indonesia dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

1. Koperasi konsumen, melaksanakan pelayanan di bidang penyediaan barang dan kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi produsen, melaksanakan pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi jasa, melaksanakan pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi simpan pinjam, melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha untuk melayani anggota.

2.1.3 Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi simpan pinjam adalah jenis koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan untuk melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggota. Simpanan dalam koperasi simpan pinjam merupakan sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai dengan perjanjian, sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasinya dalam jangka waktu tertentu dan juga membayar jasa atas pinjaman tersebut. Besarnya jasa yang dibayarkan oleh anggota ditentukan melalui rapat anggota.

Rapat anggota adalah bagian dari struktur organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan, pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang terdiri dari :

1. laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi;
2. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan koperasi;
3. laporan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
4. laporan pengawas;
5. nama pengawas dan pengurus;
6. besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018, p.28), laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Pengungkapan catatan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian kalangan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan juga merupakan suatu bentuk hasil dari pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Adapun asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah:

1. *Economic entity* yakni transaksi unit terpisah dari transaksi pemiliknya;
2. *Going concern* yakni perusahaan mampu bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen dengan pihak berkepentingan;
3. *Monetary unit* yakni informasi diukur dengan satuan uang;
4. *Periodicity* yakni kegiatan ekonomi terbagi dalam periode waktu tertentu;
5. *Accrual basic* yakni transaksi dicatat/diakui pada saat terjadinya transaksi.

Selain asumsi di atas, terdapat beberapa prinsip akuntansi dalam pelaporan keuangan, yaitu :

1. *Measurement* yakni penentuan nilai suatu item dengan satuan uang, dengan menggunakan dua alternatif, yaitu :
 - a. *historical cost* yakni biaya historis (saat terjadinya) yang dianggap representasi dari jumlah yang dibayar untuk item tertentu;
 - b. *fair value* yakni harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

2. *Revenue recognition* yakni pengakuan pendapatan dilakukan jika kemungkinan manfaat ekonomis masa depan mengalir ke perusahaan dan pengukuran dapat dilakukan dengan andal.
3. *Expense recognition* yakni pengakuan beban menunjukkan arus keluar dapat menimbulkan kewajiban sebagai akibat dari memberikan atau menghasilkan barang dan jasa.
4. *Full disclosure* yakni pelaporan keuangan dapat disajikan/diungkapkan sehingga merupakan informasi penting yang memengaruhi penilaian dan keputusan pengguna informasi.

Dalam pengimplementasiannya, entitas juga harus memperhatikan juga kendala tentang efektivitas biaya yakni biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan dan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.3.1 Gambaran Umum SAK ETAP

SAK ETAP adalah salah satu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 19 Mei 2009. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), SAK ETAP adalah standar akuntansi yang digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi III, Sayful Bahri (2020, p.23) menyatakan bahwa badan usaha yang termasuk dalam entitas tanpa

akuntabilitas publik adalah perorangan, persekutuan, firma, *commanditaire vennootschap* (CV), perseroan terbatas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan koperasi.

Ruang lingkup dari SAK ETAP adalah :

1. Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan jika :
 - a. Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
 - b. Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang, dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Karakteristik dari SAK ETAP adalah :

1. Tidak mengacu pada SAK Umum
2. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis
3. Mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP
4. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi
5. Tidak berubah selama beberapa tahun

Dengan diterapkannya SAK ETAP sebagai salah satu standar akuntansi maka, diharapkan UMKM maupun koperasi sanggup untuk menyusun laporan keuangan sendiri yang dapat diaudit sehingga mendapatkan opini audit. Laporan

keuangan ini nantinya dapat digunakan oleh entitas untuk mendapatkan dana yang berguna untuk pengembangan usahanya.

2.3.2 Karakteristik Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Semua perusahaan mempunyai prinsip dasar yang dipraktikkan dalam menjalankan bisnisnya, salah satunya adalah prinsip *going concern* yaitu usahanya akan terus berkembang dan beroperasi di masa-masa mendatang. Guna untuk mengembangkan usaha tersebut terdapat banyak sekali hal yang dapat dilakukan, salah satunya adalah pentingnya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut dalam akuntansi dapat dilakukan dengan cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

SAK ETAP sebagai salah satu standar akuntansi keuangan yang digunakan di Indonesia, disusun cukup sederhana sehingga akan mempermudah penggunaannya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang sebagian besar adalah tergolong usaha kecil dan menengah. Karakteristik laporan keuangan SAK ETAP adalah :

1. Dapat dipahami

Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti semua informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dapat dipahami dan dimengerti dengan asumsi bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna.

3. Materialitas

Kesalahan pada suatu laporan keuangan dapat dikatakan material apabila kesalahan tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan, atau dengan kata lain mampu menyesatkan proses pengambilan keputusan oleh pengguna.

4. Keandalan

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah mencakup semua fakta yang ada secara jelas dan jujur serta telah terverifikasi. Laporan keuangan yang andal harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. penyajian jujur;
- b. laporan keuangan harus substansial;
- c. laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat;
- d. netralitas.

5. Substansi mengungguli bentuk

Informasi disajikan berdasarkan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya.

6. Pertimbangan sehat

Melakukan pertimbangan dengan mengedepankan unsur kehati-hatian dalam keadaan ketidakpastian.

7. Kelengkapan

Laporan keuangan yang dapat diandalkan, harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

8. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain yang memiliki sistem, pedoman, dan kebijakan prinsip dasar akuntansi yang sama.

9. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu artinya kemampuan informasi keuangan untuk diproduksi secara tepat waktu sehingga sangat membantu pengguna dalam membuat keputusan. Ketepatan waktu informasi akuntansi sangat penting karena informasi yang disajikan secara tepat waktu, umumnya lebih relevan bagi pengguna.

10. Keseimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, secara substansi, evaluasi biaya dan manfaat merupakan suatu pertimbangan. Oleh karena itu, akan sulit mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu, sehingga perlu disadari dan dijadikan pertimbangan juga oleh para penyusun dan pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

1. Neraca

Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. Berdasarkan SAK ETAP, entitas wajib menyajikan neraca yang minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang usaha dan piutang lain-lain
- c. Persediaan
- d. Properti investasi
- e. Aset tetap
- f. Aset tidak berwujud
- g. Utang usaha dan utang lainnya
- h. Aset dan kewajiban pajak
- i. Kewajiban diestimasi
- j. Ekuitas

Urutan dan format pos-pos di atas tidak ditentukan dalam SAK ETAP. Namun, jika laporan dianggap lebih baik dan relevan dengan adanya urutan likuiditas, maka seluruh aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan urutan likuiditas.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi adalah laporan yang memberikan informasi mengenai penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Berdasarkan SAK ETAP, entitas wajib menyajikan laporan laba rugi yang minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan

- b. Beban keuangan
- c. Bagian laba atau rugi investasi (metode ekuitas)
- d. Beban pajak
- e. Laba atau rugi bersih

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai laba atau rugi entitas pada suatu periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas suatu periode, koreksi kesalahan, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, jumlah investasi, jumlah dividen, dan distribusi ke pemilik ekuitas pada periode tersebut.

4. Laporan Arus Kas

Berdasarkan SAK ETAP laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dalam satu periode yang terbagi dalam 3 aktivitas, yaitu :

a. Aktivitas operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

b. Aktivitas investasi

Aktivitas investasi adalah perolehan dana pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Contoh dari aktivitas kegiatan investasi adalah hasil dari penjualan aset tetap, penjualan investasi, dan penagihan pokok pinjaman kepada pihak lain.

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dari pinjaman perusahaan. Contoh dari aktivitas pendanaan adalah penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pinjaman.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang memberikan informasi dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan secara naratif, rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, serta informasi atas pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP, CaLK harus mengungkapkan :

- a. Dasar penyusunan laporan keuangan
- b. Kebijakan akuntansi yang signifikan
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tapi relevan untuk memahami laporan keuangan

Urutan penyajian CaLK berdasarkan SAK ETAP adalah :

- a. Pernyataan kepatuhan sesuai SAK ETAP
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
- c. Informasi yang mendukung pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian dalam laporan keuangan
- d. Pengungkapan lain, yaitu: kejadian setelah tanggal neraca, standar akuntansi baru, dan kondisi ekonomi global
- e. Informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi

Informasi penting yang diharuskan oleh SAK ETAP adalah :

- a. Transaksi hubungan istimewa
- b. Kontingensi
- c. Kontrak kerja sama